

# UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/005

Tanggal Berlaku : 23 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --

Tanggal Review : 22 Juni 2026

Halaman : 1/3

PERUBAHAN :	ALASAN PERUBAHAN :
-	-
DISPOSISI:	
•	

Unit	Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
	SR.OFF. MEDIA COM	SM CORCOM	SVP CORSEC
Biro Corsec	Aura-		MM
Nama	Asita Dewi P.	Nabila Laras Satwikawati	Joko Raharjo
Tanggal	23 /06 / 202n	23/06/2029.	25/06/2024



## UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/005

Tanggal Berlaku : 23 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 22 Juni 2026

Halaman : 2/3

#### 1. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.1. MAKSUD

Prosedur PPID ini disusun dan dibuat untuk mengatur tata cara penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian atas pelayanan informasi bagi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1.2. TUJUAN

- a. Menghindari penyalahgunaan dan tertib dalam pengelolaan informasi perusahaan terkait pengungkapan informasi;
- b. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang Transparan, Akuntanbilitas, Bertanggungjawab, Independensi, Kesetaraan & Kewajaran;
- c. Menangani penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk lingkungan internal perusahaan tentang uji konsekuensi informasi yang dikecualikan serta prosedur pelayanan informasi publik.

#### 3. REFERENSI

- 3.1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



## UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/005

Tanggal Berlaku : 23 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 22 Juni 2026

Halaman : 3/3

3.4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

 Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk Nomor: 111/SK/PP/DIR/2021 tanggal
 Juni 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PP (Persero) Tbk.

### 4. DEFINISI

Istilah	Pengertian			
KIP Pusat	Komisi Informasi Pusat			
KIP	Keterbukaan Informasi Publik			
Pejabat Pengelola	Merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang			
Informasi dan	penyimpanan, pedokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan			
Dokumentasi (PPID)	informasi di badan publik.			
Daftar Informasi Publik (DIP)	Merupakan catatan yang berisi keteranfan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.			
Informasi Publik	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta infromasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.			



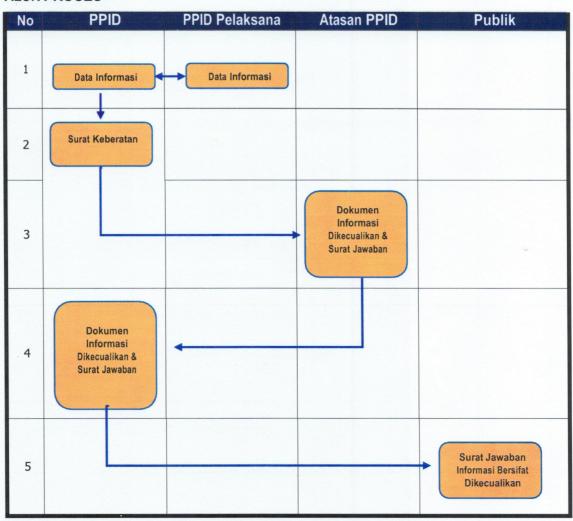
## UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/005

Tanggal Berlaku : 23 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 22 Juni 2026

Halaman : 1/3

#### 5. ALUR PROSES





# UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/005

Tanggal Berlaku : 23 Juni 2024

Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 22 Juni 2026

Halaman : 1/3

### **SEJARAH DOKUMEN**

No	Asli / Revisi / Amandemen	Tanggal Berlaku	Keterangan Perubahan
1.	Asli	24-Jun-2022	